

# Berkubang Lumpur Merawat Alam: Pengembangan Institusi Sosial dalam Proses Konservasi Bakau di Tongke-tongke, Sinjai Timur

*Burhanuddin Gala  
( Universitas Indonesia )*

## Pendahuluan

Dalam kaitannya dengan persoalan hutan mangrove, di Sulawesi Selatan kita dapat menjumpai adanya gejala konservasi hutan mangrove yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya pesisir. Penelitian yang dilakukan berupaya untuk memahami gejala tersebut dalam rangka memberikan sumbangan terhadap upaya-upaya memperbaiki kondisi kritis hutan mangrove serta abrasi pantai yang terjadi di sejumlah tempat di Sulawesi Selatan dan daerah lainnya.

Untuk tujuan itu, penelitian ini memilih lokasi yang menggambarkan bagaimana konservasi dan pemanfaatan hutan mangrove yang ada. Lokasi terletak di Lingkungan Tongke-tongke, sebuah wilayah pesisir di mana terjadi suatu proses penanaman dan konservasi mangrove yang cukup berhasil dan terkenal di Sulawesi Selatan.

Melalui penelitian di tempat ini, pertanyaan utama yang ingin dicari jawabannya adalah proses dan kondisi-kondisi sosial apa yang berpengaruh terhadap penanaman dan pemeliharaan hutan mangrove di kawasan pesisir tersebut. Diharapkan jawaban-jawaban yang diperoleh dapat memperkaya pemahaman kita tentang proses dan kondisi sosial yang berperan penting bagi konservasi dan pemeliharaan hutan mangrove. Pemahaman tersebut merupakan titik tolak penting untuk mengembangkan suatu kegiatan yang bertujuan menyelamatkan kawasan pesisir yang sudah kritis kondisinya dan sekaligus jika mungkin

memberdayakan komuniti yang tinggal di kawasan tersebut.

## Lingkungan Tongke-tongke

Lingkungan Tongke-tongke adalah sebuah daerah yang terletak di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Lingkungan ini berjarak sekitar 230 km dari Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Tongke-tongke terdiri dari daerah pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai, yang pantainya masuk dalam wilayah Teluk Bone.

Mayoritas penduduk Tongke-tongke adalah suku Bugis. Jumlah keseluruhannya sampai dengan bulan Maret tahun 1999 adalah 1809 jiwa. Terdapat 290 orang kepala keluarga laki-laki dan 37 orang kepala keluarga wanita (sumber: Kantor Kelurahan Samataring, Maret, 1999). Berdasarkan asal usulnya, penduduk Tongke-tongke dibedakan menjadi penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli telah menempati daerah ini jauh sebelum penduduk pendatang memasuki wilayah ini, yang datang sekitar tahun 1930-an. Para nelayan pendatang ini berasal dari Kecamatan Mare, Bone Selatan. Mereka adalah para nelayan keturunan Bajo yang telah sejak lama mengandalkan hidupnya dari hasil laut.

Penduduk asli Tongke-tongke menempati tiga dusun yaitu Bentenge, Lombok dan Borong Uttie dan menguasai lahan yang ada di bagian atas yang dikelola menjadi sawah dan kebun. Penduduk pendatang menempati daerah pesisir, bertempat tinggal di dua dusun pesisir Babana dan Cempae, dan bekerja sebagai nelayan yang menangkap ikan di sekitar perairan Teluk Bone sampai ke Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara bahkan sampai ke perairan Australia, menangkap berbagai jenis ikan dan biota laut lain yang bernilai ekonomi.

Pekerjaan penduduk Tongke-tongke, selain sebagai petani dan nelayan juga terdapat sebagian kecil yang mengelola tambak yang menghasilkan ikan Bandeng, Udang dan terutama Rumput Laut. Bagi para nelayan, hasil yang mereka dapatkan dijual kepada bos/ponggawa mereka. Hampir semua nelayan di wilayah ini memiliki seorang bos/ponggawa yang membantu mereka dalam hal modal, perlengkapan penangkapan dan sebagainya. Para petambak menjual sendiri produk yang mereka hasilkan ke pasar lokal atau kepada pengumpul yang datang atau yang tinggal di kota Kabupaten, tergantung dari harga yang cocok. Demikian juga dengan para petani yang menjual hasil sawah dan kebun mereka ke pasar-pasar lokal. Uang hasil penjualan yang didapatkan rata-rata digunakan untuk keperluan rumah tangga mereka, sisanya dikumpulkan di rumah atau di bank dan bila mencukupi digunakan untuk pengembangan usaha lebih lanjut misalnya menambah perahu, memperluas tambak atau sawah.

## Awal-mula konservasi bakau

Sejarah awal terjadinya konservasi bakau di Tongke-tongke dapat ditelusuri mulai dari tahun 1960. Ketika itu tanah-tanah yang terdapat di Tongke-tongke masih dikuasai oleh Raja Sinjai Timur dan beberapa bangsawan lain. Raja Sinjai

Timur menguasai tanah di bagian selatan desa dan di bagian pesisir yang dikelola menjadi tambak. Sedang beberapa bangsawan menguasai tanah di bagian utara dan pertambakan di bagian barat desa.

Sekitar tahun 1960-1980-an tambak-tambak milik Raja Sinjai Timur yang terletak di bagian pesisir mulai habis terkena abrasi dan kemudian diambil alih oleh negara karena Raja Sinjai Timur melepaskan haknya dengan tidak membayar pajak atas tambak yang telah hancur. Setelah menjadi tanah negara, masyarakat nelayan pendatang yang tinggal di sekitarnya kemudian mulai menanaminya dengan bakau. Pengelolaan tanah negara dengan penanaman bakau membuat masyarakat yang menanaminya mendapatkan hak pakai dari tanah tersebut, sementara hak kepemilikannya tetap ada pada negara.

Perubahan hak-hak kepemilikan (*property rights*) lahan pesisir Tongke-tongke dari *private property* (milik Raja dan Bangsawan) menjadi milik negara (*state property*) memang merupakan faktor penting dapat dimulainya usaha awal penanaman bakau, sebab penduduk bisa bebas menanam lahan yang ada, setelah penguasaannya tidak lagi ditangan orang atau pihak tertentu (*private property*).

Setelah menjadi milik negara, kawasan pesisir Tongke-tongke menjadi *open access*, dan sebagai suatu kawasan yang secara *de facto* bersifat terbuka (*open access*), hak-hak atas lahan cenderung tidak jelas, tidak ada pengaturan, dan bebas untuk dimanfaatkan oleh siapa saja (Feeny, 1994).

Setelah menjadi *open access*, proses selanjutnya adalah diberikannya "batas" wilayah pesisir Tongke-tongke oleh penduduk Tongke-tongke dan diakui sebagai wilayah mereka yang hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Tongke-tongke. Di sini kembali terjadi perubahan hak-hak kepemilikan lahan dari milik negara (*state property*) menjadi milik komunal (*common property*).

Tahap akhir dari proses ini adalah pengkaplingan wilayah pesisir Tongke-tongke menjadi milik individu-individu yang kemudian ditanami bakau oleh mereka. Berkembanglah semacam privatisasi atas lahan yang secara *de jure* sebenarnya masih merupakan milik negara, tetapi secara *de facto* seakan sudah menjadi milik penduduk Tongke-tongke (lihat Berkes, 1994; Feeny, 1994). Sebagai hak milik individu atau *private property*, pengklaiman hak atas sumberdaya itu dilaksanakan oleh individu-individu atau kepala-kepala rumah tangga.

Penanaman bakau yang awalnya dilakukan oleh para individu yang bekerja sebagai nelayan, yang mendiami pesisir ini disebabkan karena terancamnya lokasi pemukiman tempat tinggal mereka oleh abrasi, ombak dan angin. Sebagai nelayan, mereka tidak memiliki pilihan untuk mencari tempat tinggal yang lain yang jauh dari tepi pantai karena adanya perahu-perahu mereka yang harus selalu dijaga, dan juga tidak boleh jauh dari laut karena setiap saat mereka harus keluar mencari nafkah. Lagi pula mereka tidak mempunyai akses ke lahan di bagian atas yang dikuasai oleh penduduk asli. Hal ini menyebabkan warga nelayan pesisir terpaksa

mencari cara melindungi pemukiman mereka, dan cara yang akhirnya berhasil adalah dengan penanaman bakau setelah sebelumnya gagal dengan perlindungan batu karang dan pasir.

Ide untuk menanam bakau awalnya muncul dari beberapa orang tua kampung yang melihat bahwa desa tetangga mereka, pantai dan tambaknya selamat karena terlindungi oleh pohon-pohon bakau alam dan jenis tumbuhan mangrove lainnya. Para tua kampung inilah yang kemudian menjadi pionir penanaman bakau yang kemudian diikuti oleh sebagian besar penduduk kampung. Walau demikian tidak semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk perlindungan kampung, sebagian lainnya hanya ikut-ikutan dan menanam untuk memperoleh kayu bakar dan sebagian lagi untuk mendapatkan lahan, yang dikemudian hari dapat dikelola dalam bentuk lain seperti tambak, yang mereka lihat dan pelajari dari desa tetangga mereka. Kesempatan untuk memperoleh lahan inilah yang kemudian berkembang terus dan menjadi motivasi yang mendorong perluasan penanaman bakau selanjutnya.

Strategi penanaman yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu mengkapling lahan dengan luas tertentu dan kemudian menanaminya dengan bakau. Umumnya penanaman dilakukan pada musim Barat antara bulan September sampai bulan April, dimana pada waktu ini ombak tidak terlalu besar di wilayah Teluk Bone. Pada saat musim Timur datang antara bulan Mei sampai bulan Agustus membawa ombak besar dan angin kencang, bakau yang ditanam musim sebelumnya diharapkan sudah dapat bertahan dan tumbuh. Penanaman bakau dilakukan dengan jarak rapat (50x50 cm) dengan tujuan bila telah tumbuh dapat cepat menahan ombak karena kerapatannya. Pada proses penanaman untuk menumbuhkan bakau hal terpenting yang harus dilakukan adalah penyulaman untuk mengganti bibit yang hilang tercabut, rusak atau patah terkena ombak atau hama.

Setelah usaha penanaman secara swadaya itu dilakukan selama 15 tahun, bakau-bakau itu pun tumbuh mencapai ketinggian 5 m lebih dengan ukuran batang berdiameter lebih dari 20 cm. Kini untuk seluruh wilayah Kelurahan Samataring, luas hutan mangrove yang didominasi bakau itu mencapai 600 ha lebih dengan ketebalan antara 200-700 m dari garis pantai. Dengan ketebalan seperti ini, hutan mangrove itu dapat dikatakan telah dapat berfungsi sebagai penyangga fisik bagi perairan pantai (Ogdeu et.al. 1983 dalam Salam et.al. 1994).

Bakau-bakau yang ditanam penduduk Tongke-tongke saat ini memberikan banyak manfaat kepada mereka. Selain melindungi pantai dan perkampungan mereka, endapan lumpur yang tertahan oleh akar-akar bakau lama kelamaan mengeras dan membentuk daratan baru yang dapat dijadikan pemukiman atau diolah untuk kepentingan ekonomi. Hutan bakau yang tumbuh ini juga menyaring air tanah dan melindunginya dari rembesan air laut sehingga menjadi lebih tawar dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk diminum.

Pohon bakau sendiri memberi banyak manfaat, daunnya dijadikan makanan ternak, buahnya dijadikan bibit, batang dan akar dijadikan kayu bakar. Batangnya yang keras juga sangat baik dijadikan perkakas rumah. Lahan-lahan tempat tumbuhnya bakau juga sebenarnya memberi kemungkinan untuk dijadikan tambak seperti keinginan banyak warga masyarakat yang memilikinya, namun hal ini sampai sekarang masih dilarang oleh pemerintah karena kekhawatiran akan habisnya bakau ditebangi. Hanya empang parit yaitu perpaduan antara empang dengan pohon bakau pernah diijinkan dan telah ada beberapa petak yang diusahakan oleh penduduk. Empang parit ini masih menjadi hal yang dipertentangkan oleh Dinas Perikanan, PKT dan penduduk sendiri karena adanya ketidaksesuaian antara luas lahan persyaratan minimal untuk membuka empang parit dengan luas lahan yang ada yang dimiliki setiap penduduk.

Keberhasilan menumbuhkan bakau selanjutnya merubah fungsi bakau itu sendiri dari sekedar pelindung pantai menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Banyak pemilik pohon bakau menjual kayu-kayu bakau miliknya untuk menambah penghasilan atau malah menjual langsung bakau beserta lahannya, untuk mendapatkan uang bagi keperluan ekonomi rumah tangganya. Walau demikian, kegiatan penjualan kayu bakau ini belum berlangsung secara terbuka karena adanya kontrol pemerintah daerah terhadap wilayah Tongke-tongke yang kini ditetapkan sebagai wilayah konservasi bakau.

Terbentuknya hutan bakau juga berimplikasi terhadap munculnya jenis biota lain yang sebelumnya tidak ada, baik yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi maupun tidak. Biota itu adalah Kepiting dan berbagai jenis ikan seperti Baronang dan Balana, Kalelawar dan Bangau. Munculnya Kepiting dan berbagai jenis ikan ini membuka kemungkinan perolehan lain selain dari laut yang dapat menambah penghasilan mereka.

Setelah bakau tumbuh besar dan membentuk hutan primer yang memberi banyak manfaat, maka masalahnya sekarang bagaimana menjaga kelestariannya dengan tetap memperhitungkan masyarakat yang menanamnya yang siap memanfaatkan bakau dan lahan tersebut demi keuntungan. Pohon bakau dan jenis tumbuhan mangrove lainnya yang ikut tumbuh serta lahannya memberi keuntungan yang nyata, misalnya penjualan kayu bakar dari pohonnya dan pembuatan tambak dari bekas lahannya. Bila ini terjadi dapat dipastikan bahwa bakau-bakau tersebut akan kembali dibabat dan hanya akan tersisa sedikit. Oleh karena itu sebelum hal ini terjadi, pihak pemerintah daerah secara serius memberi perhatian melalui beberapa departemen (Perikanan dan PKT), membuat regulasi mengenai pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan hutan bakau di daerah Sinjai dan memberikan program-program pemanfaatan yang tidak merusak. Sayangnya sampai saat ini belum ada program yang berjalan baik dan memuaskan hati masyarakat, di sana-sini penebangan-penebangan liar yang luput dari pantauan masih tetap terjadi, walau sebenarnya kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga hutan bakau juga tinggi. Hal ini didukung data demografi yang menyatakan bahwa lebih dari 60%

penduduk Tongke-tongke mengetahui manfaat hutan bakau dan oleh karena itu penting untuk dijaga kelestariannya, dan lebih dari 48% mengetahui cara melestarikannya.

Dengan berhasilnya penanaman bakau di Tongke-tongke oleh masyarakat secara swadaya, maka daerah ini menjadi terkenal sampai ke luar negeri dan mendapatkan Kalpataru dari Pemerintah Indonesia tahun 1995. Sampai saat ini Tongke-tongke sangat sering mendapat kunjungan dari berbagai instansi, universitas, LSM ataupun perorangan dari dalam dan luar negeri, baik untuk sekedar melakukan peninjauan ataupun untuk mempelajari dan meneliti bakau dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya. Namun juga disayangkan, berbagai kunjungan ini belum memberi kontribusi yang berarti terhadap masyarakat Tongke-tongke sendiri terutama bagi peningkatan ekonomi mereka.

### *Social capital*

Berhasilnya masyarakat Tongke-tongke menumbuhkan bakau hingga membentuk hutan primer ratusan hektar tidak terlepas dari bentuk-bentuk sosial capital yang ada pada masyarakat. Kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Tongke-tongke memiliki hubungan kekerabatan menjadi perekat hubungan sosial yang baik yang menimbulkan suasana keakraban, ditambah adanya waktu senggang selama istirahat dari melaut, yang digunakan untuk saling berkumpul dan berbagi cerita atau bermain bersama membuat terbaginya pengetahuan dan pengalaman ke hampir semua orang. Setiap kegiatan yang dilakukan satu orang biasanya juga diketahui oleh orang lainnya.

Dalam konteks penanaman bakau, seseorang yang melakukan kegiatan tersebut karena dirasakan bermanfaat dengan cepat akan diketahui dan diikuti oleh yang lain. Hubungan sosial yang baik juga memunculkan sifat tolong menolong di antara sesama warga sehingga bantu membantu dalam penanaman menjadi hal yang biasa.

Secara tidak langsung hubungan sosial yang baik yang membuat terbaginya pengetahuan akan manfaat bakau, pengetahuan mengenai peraturan-peraturan pemerintah berkaitan dengan pelarangan perusakan bakau, membuat mereka saling mengawasi dan hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat bakau-bakau yang ada masih dapat bertahan dari perusakan.

### **Pengembangan institusi sosial**

Faktor penting lainnya yang ikut berperan dalam berhasilnya konservasi bakau di Tongke-tongke adalah dikembangkannya institusi sosial masyarakat. Pada awalnya, seiring dengan dilakukannya penanaman bakau, disepakati pula untuk menetapkan aturan-aturan yang berkenaan dengan siapa yang berhak menanam, bagaimana lahan dipilih, batas antara satu petak lahan dengan petak lainnya, siapa yang berhak memetik hasil dari bakau yang telah tumbuh dan sebagainya dan faktor sosial capital dalam masyarakat turut membantu disepakati dan ditaatinya peraturan-peraturan ini

tanpa masalah berarti.

Aturan tentang siapa yang boleh melakukan penanaman bakau di wilayah pesisir Tongke-tongke menyatakan bahwa hanya warga masyarakat Tongke-tongke saja yang berhak memilih lahan dan menanam bakau di tempat ini, dan tidak memperbolehkan orang yang berasal dari luar wilayah Tongke-tongke. Berkembang semacam kesepakatan di antara mereka untuk mempertahankan wilayahnya ini dari kemungkinan masuknya orang-orang luar yang juga ingin memanfaatkan lahan di kawasan ini. Karena itu hingga saat ini belum ada seorang pun yang berasal dari luar Tongke-tongke memiliki lahan bakau di lingkungan ini. Upaya mempertahankan wilayah dari eksploitasi oleh penduduk dari luar menunjukkan adanya kesadaran untuk mengklaim wilayah tersebut sebagai 'wilayah mereka' dan bukan 'wilayah orang lain'. Nampak berkembang suatu kesadaran atas kepemilikan sumberdaya secara bersama, yang dikenal dengan *common property* (lihat Berkes 1994; Ostrom 1992). Komunitas pengguna sumberdaya tersebut dapat diidentifikasi, yakni penduduk Tongke-tongke dan bukan penduduk dari luar Tongke-tongke.

Aturan tentang pengklaiman secara individu ikut diterapkan dan juga dilakukan sejak awal mula kegiatan penanaman bakau. Ini dimaksudkan untuk menghindari pertikaian akan kepemilikan bakau di kemudian hari. Tetapi, yang lebih utama, pengklaiman dilakukan untuk mengukuhkan hak atas tanah yang dikelola masing-masing dengan cara menanam bakau, walau hingga saat ini pengukuhan hak atas tanah yang dikelola masing-masing individu tersebut belum diakui secara resmi oleh pemerintah.

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh warga masyarakat Tongke-tongke ini, juga menyangkut tentang konflik dan penyelesaiannya bila terjadi di antara warga masyarakat berkaitan dengan bakau. Konflik yang paling terjadi adalah pelanggaran areal kosong yang menjadi batas antara satu lahan dengan lahan lainnya, yang secara sengaja ditanami oleh seseorang yang membuat marah pemilik lahan sebelahnya, sebab dikhawatirkan bila tanaman itu telah tumbuh besar akan menutup batas antar lahan. Hampir semua konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Tongke-tongke baik menyangkut bakau atau bukan, diselesaikan secara interen dengan melibatkan para orang tua kampung dan tokoh adat.

Walaupun tanpa wadah peraturan-peraturan tersebut dapat berjalan efektif dan mengalir di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan dibuat oleh masyarakat sendiri untuk kepentingan mereka, dijalankan dan dipatuhi secara bersama pula. Aturan atau institusi yang mereka bangun menjadi mekanisme yang mengatur perilaku-perilaku agar tidak bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat bersama oleh warga masyarakat Tongke-tongke. Institusi menjadi perekat dan menjaga masyarakat dari adanya perpecahan sehingga terjadi keteraturan dalam pembagian lahan, maupun pengelolaan. (Elster, 1989). Walau sebenarnya institusi yang dibangun

jelas tidak memuaskan semua orang dalam masyarakat Tongke-tongke, setidaknya dapat meredam dan memberi perlindungan dari kehancuran akibat kepentingan pribadi orang per orang sehingga proses konservasi dapat berjalan baik.

Satu hal yang unik dari institusi adalah walaupun ia dibuat oleh manusia, tetapi setelah terbentuk dan disepakati maka institusi akan mengendalikan semua orang termasuk para pembuatnya. Institusi berpengaruh besar memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan tertentu yang diinginkan oleh institusi. Kekuatan memaksa yang dimiliki oleh institusi untuk melakukan perubahan perilaku didukung dengan penggunaan power yang merupakan aspek penting dari institusi. Power yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mengeliminir setiap praktek yang tidak diinginkan (ibid).

Aspek penting lain dari institusi adalah adanya sanksi dan penghargaan yang ikut menyertainya. Sanksi diberlakukan bagi para pelanggar dan akan memberikan penghargaan bagi orang yang dianggap berprestasi. Power yang dipakai untuk memaksa yang dimiliki oleh institusi tidak terlepas dari sanksi ini apapun jenisnya. Sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar, berupa sanksi hukum atau sanksi sosial yang kadang-kadang lebih kuat pengaruhnya.

Pada institusi masyarakat Tongke-tongke dalam konteks penanaman bakau, sanksi sosial nampaknya lebih kuat dibanding sanksi hukum umum. Walaupun sanksi ini jarang diterapkan tetapi masyarakat mengetahuinya dan sedapat mungkin menghindari pelanggaran yang akan memicu konflik. Kekkerabatan yang kuat di antara penduduk semakin membuat setiap orang saling menjaga dengan lainnya, dan hal ini ikut memperkuat institusi yang berjalan secara wajar walaupun tanpa pengawas khusus yang dibentuk untuk itu. Dengan kata lain terdapat aspek-aspek yang telah disebutkan yang mengkondisikan masyarakat untuk saling bertenggang rasa dan saling mengawasi demi keuntungan bersama.

Satu hal yang jelas bahwa masyarakat nelayan pesisir Tongke-tongke terbiasa mengikuti dan mematuhi aturan serta bekerja sama. Hal ini terkait erat dengan dunia kenelayanan yang mereka geluti. Sepanjang sejarahnya, nelayan-nelayan di Sulawesi Selatan sejak dahulu telah menganut sistem *patron-client*, dimana setiap nelayan terikat dengan seorang ponggawa atau bos yang menjamin kelangsungan hidupnya baik secara ekonomi maupun secara sosial sepanjang ia berada di bawah naungan sang ponggawa. Kedua, dunia nelayan adalah pekerjaan yang memiliki resiko kehilangan yang tinggi dan nelayan khususnya yang berlayar jauh antar pulau atau benua pergi dalam kelompok-kelompok. Resiko kecelakaan yang tinggi di laut membutuhkan kerjasama dan kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan dan pemimpin yang lebih berpengalaman bila ingin selamat. Semua hal ini juga tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari di daratan dan institusi yang juga membutuhkan kepatuhan dan kedisiplinan untuk hidup jelas tidak terlalu sulit untuk berkembang di tengah masyarakat seperti ini.

Pada tahun 1995 pihak pemerintah daerah membuat suatu wadah untuk masyarakat penanam bakau ini yang bernama kelompok tani ACI (Aku Cinta Indonesia) yang kegiatannya difokuskan terhadap penanaman dan penyulaman bakau. Wadah atau organisasi ini sebenarnya diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat yang menanam bakau, namun sayang karena dibentuk dari "atas" untuk kepentingan sesaat (untuk penerimaan hadiah Kalpataru bidang penyelamatan lingkungan tahun 1995.) dan bukan atas inisiatif masyarakat, maka wadah ini tidak berjalan secara baik. Institusi sosial atau aturan-aturan yang ada berkaitan dengan penanaman bakau tidak tertampung di sini tapi tetap berjalan tanpa wadah di tengah masyarakat seiring dengan irama kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara tidak langsung institusi ini diakui keefektifannya oleh pemerintah daerah, oleh karena itu mereka tidak berusaha merombak apa yang ada tetapi memperkuat dengan sangsi-sangsi hukum yang sebenarnya juga jarang diterapkan dan dukungan dari beberapa lembaga pemerintah terkait. Dukungan lembaga-lembaga pemerintah ini cukup memegang peranan dalam mempertahankan keberadaan bakau di Tongke-tongke. Walaupun keterlibatan lembaga-lembaga tersebut baru dimulai ketika bakau mulai tumbuh besar tetapi secara teratur mereka mengikuti proses pertumbuhannya sampai sekarang. Hampir semua lembaga terkait mulai dari Pemerintah Daerah, Dinas PKT, Dinas Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan sampai ketingkat Camat dan kelurahan memberi perhatian terhadap bakau di Tongke-tongke dan seluruh wilayah pesisir Sinjai yang ditumbuhi bakau dan jenis mangrove lainnya.

Walau tidak rutin tetapi hampir setiap bulan ada kunjungan dari pejabat setempat ke lokasi hutan bakau dan penyuluhan-penyuluhan tentang manfaat hutan bakau dan bahaya yang dapat ditimbulkan bila hutan ini dirusak selalu diadakan.

Disamping penyuluhan-penyuluhan dan penerapan aturan disertai pengawasan, pihak pemerintah tetap berusaha mencari solusi bagaimana agar masyarakat yang menanam dan menjadi pemilik hutan bakau dapat memperoleh manfaat dari tanamannya tanpa merusak bakau yang ada, sebab sampai saat ini belum ditemukan jalan keluar antara keuntungan yang dapat diperoleh dari tanaman pohon bakau di satu sisi dengan pelestarian alam di sisi lain. Nampaknya pemerintah daerah sadar bahwa warga Tongke-Tongke yang menanam bakau memiliki hak penuh atas bakau mereka dan pengawasan dengan dalih pelestarian seperti sekarang ini tidak dapat menjamin terus menerus keberadaan hutan bakau, karena desakan ekonomi yang dirasakan masyarakat, dan walaupun saat ini masyarakat masih terlihat patuh tetapi hal ini tidak akan berlangsung lama bahkan saat ini pun telah ada yang mulai menebangi bakaunya sedikit demi sedikit bila tidak terlihat oleh petugas.

Bukti keseriusan Pemerintah Daerah Sinjai sendiri bekerjasama dengan pihak yang terkait menangani bakau di seluruh wilayah pesisir mereka, dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelestarian,

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Bakau. Peraturan Daerah tentang bakau ini merupakan Peraturan Daerah pertama yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Keberhasilan institusi sosial masyarakat Tongke-tongke disertai pengawasan yang dilakukan pemerintah, membuat bakau swadaya di Tongke-Tongke masih dapat bertahan setidaknya sampai saat ini, dan ini membuat Tongke-Tongke, sebuah lingkungan yang kecil, terkenal ke mana-mana, dan hampir setiap saat dikunjungi oleh pendatang dalam dan luar negeri, baik untuk belajar, meneliti ataupun sekedar melihat dan mengadakan studi banding, dan hal ini kembali membuat pihak pemerintah tetap bertekad menjaga kelestariannya sambil memikirkan cara menyejahterahkan warga yang menanamnya.

## Kepustakaan

Berkes, F.

1994 'Property Rights and Coastal Fisheries', dalam R.S. Pomeroy (peny.) *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries In Asia and The Pacific: Concepts, Methods, and Experiences*. Manila: ICLARM.

Elster, J.

1989 *Nuts and Bolts for the Social Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press.

Feeny, D.

1994 'Frameworks for Understanding Resource Management on The Commons', dalam R.S. Pomeroy (peny.) *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries In Asia and The Pacific: Concepts, Methods, and Experiences*. Manila: ICLARM.

Ostrom, E.

1992 *Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation Systems*. San Francisco: Institute for Contemporary Studies Press.

Salam, H. Arsyuddin, dkk.

1994 Peranan Ekosistem Mangrove dalam Pelestarian Sumberdaya Hayati Perairan, Makalah Pada Lokakarya Peran Biologi Dasar dalam Bidang Ilmu Kelautan, Ujung Pandang, 29 Nopember -2 Desember 1994.

Lampiran 1

Jenis-jenis Tumbuhan Mangrove yang Terdapat di Lingkungan Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

No.	Nama Lokal ( <i>Vernacular Name</i> )	Nama Ilmiah ( <i>Scientific Name</i> )	Kegunaan	Habitat Lama	Habitat Baru
1	Bakko, Bangko, Cokke	Rhizophora	Kayu bakar, perkakas, perkakas rumah tangga, arang, makanan ternak	Tidak Ada	300 ha sepanjang pesisir Tongke-tongke
2	Beropa	Sonneratia Alba	Tiang rumah, rusuk perahu, kayu bakar.	Tidak ada	Sekitar 20 - 30 pohon tersebar di antara Rhizophora
3	Api-api	Avicenia Alba	Kayu Bakar	Tidak Ada	Tersebar mencakup wilayah seluas 400 m <sup>2</sup> di belakang Rhizophora
4	Nipa	Nypa Fruticans	Atap rumah, buahnya dimakan dan disaring untuk dijadikan ballo (tuak tradisional)	Sepanjang Sungai Baringeng dan Sungai Sinjai	Sepanjang Sungai Baringeng dan Sungai Sinjai

Sumber: Kelompok ACL Tahun 1999

Lampiran 2

Jenis-jenis Fauna yang Terdapat di Hutan Bakau Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

No.	Nama Dalam Bahasa Lokal	Nama Dalam Bahasa Indonesia	Kegunaan
1	Bukkang	Kepiting Bakau	Dikonsumsi dan dijual
2	Bale Bolu	Ikan Bandeng	Dikonsumsi dan dijual
3	Baronang	Ikan Baronang	Dikonsumsi dan dijual
4	Balana	Ikan Balana	Dikonsumsi dan dijual
5	Bonti	Ikan	Dikonsumsi dan dijual
6	Lamerre	Ikan	Dikonsumsi dan dijual
7	Bale Jawa	Ikan Mujair	Dikonsumsi dan dijual
8	Nener	Nener	Dijual ke petambak lokal
9	Benur	Benur	Dijual ke petambak lokal
10	Doang Pute	Udang Putih	Dikonsumsi dan dijual
11	Doang Sitto	Udang Galah	Dikonsumsi dan dijual
12	Doang Lath	Udang Keras	Dikonsumsi dan dijual
13	Lenrong	Belut	Ditangkap untuk dijadikan umpan bucu
14	Pararang	Biawak	Ditangkap untuk dijual kepada orang kota yang berminat
15	Kondo Pute	Bangau Putih	Tidak dimanfaatkan kecuali oleh anak-anak yang kadang menangkapnya lalu dibakar sebelum dimakan
16	Kondo Bakka	Bangau Coklat	Tidak dimanfaatkan kecuali oleh anak-anak yang kadang menangkapnya lalu dibakar sebelum dimakan
17	Manu Pasellung	Burung Laut	Tidak dimanfaatkan
18	Panning	Kelelawar	Ditangkap lalu dijual ke orang yang berminat (walaupun hal ini dilarang oleh Pemda)

Sumber: Kelompok ACL Tahun 1999

PETA PEMUKIMAN  
LINGKUNGAN TONGKE-TONGKE  
SKALA 1 : 50.000

